

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Teknologi digitalisasi merupakan sebuah perubahan yang dalam pengoperasiannya tidak perlu menggunakan banyak tenaga manusia. Secara etimologi, istilah digitalisasi berasal dari bahasa latin *digitus* yang artinya jari. Istilah ini mengacu pada salah satu alat komputer paling awal yang digunakan dalam menyimpan dan mentransmisi informasi. Pada intinya, digitalisasi merupakan perubahan teknologi dari bentuk mekanik dan elektronik analog menjadi teknologi digitalisasi. Pergeseran transformatif teknologi dimulai pada tahun 1980-an dan masih tetap bertahan sampai saat ini (Wibowo, 2023:1).

Digitalisasi merupakan proses modernisasi atau revitalisasi pemanfaatan teknologi yang sering dikaitkan dengan keberadaan internet dan teknologi informasi. Paradigma ini mencakup ranah kemungkinan yang dibuat layak melalui pemanfaatan perangkat canggih dan memfasilitasi kenyamanan bagi individu. Munculnya teknologi digitalisasi dibentuk oleh tiga elemen kunci, yaitu: 1) transformasi digitalisasi, karena industri produk digitalisasi yang berkembang pesat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, 2) konvergensi jaringan, melayani permintaan individu dari seluruh dunia dan 3) infrastruktur digitalisasi, memperoleh pengetahuan sebagai komponen integral dari suatu produk (Wibowo, 2023:2).

Pada saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memudahkan pekerjaannya, terutama bagi masyarakat yang memiliki usaha. Mereka dapat menggunakan mesin-mesin canggih,

seperti sosial media, *e-commerce* dan sistem lain yang akan berdampak pada keefektifan, kualitas dan kuantitas dalam kegiatan usahanya. Pada saat usaha yang ditekuninya berkembang pesat, ini akan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Penggunaan teknologi tidak hanya sebagai alat atau benda fisik yang digunakan begitu saja akan tetapi dibutuhkan inovasi, metode maupun segala upaya yang dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupan masyarakat (Mardikanto & Soebiato, 2017:7).

Segala upaya yang dilakukan untuk perbaikan kesejahteraan hidup baik bagi setiap individu maupun masyarakat luas dapat disebut dengan pembangunan. Dalam aspek kecil, pembangunan diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik atau menjadikan kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Pembangunan tidak hanya dilakukan pada aspek infrastruktur saja, tetapi juga dilakukan pada aspek sosial, politik dan ekonomi. Secara sederhana fungsi pembangunan dikategorikan menjadi tiga tugas utama yang harus pemerintah lakukan, yaitu pertumbuhan ekonomi, perawatan masyarakat dan pengembangan manusia (Mardikanto & Soebiato, 2017:2).

Fungsi pertumbuhan ekonomi lebih mengacu pada apa yang harus dilakukan untuk berwirausaha agar mendapatkan pendapatan finansial untuk membantu pelaksanaan pembangunan. Fungsi perawatan masyarakat mengacu pada apa yang harus dilakukan untuk merawat dan melindungi masyarakat agar terhindar dari berbagai macam hal yang berpotensi mengancam kehidupannya. Sedangkan fungsi pengembangan manusia mengacu pada bagaimana cara meningkatkan kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat menjamin angkatan kerja yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Ketiga fungsi tersebut harus berjalan secara seimbang supaya pembangunan dapat berjalan dengan optimal dan bisa bersaing di pasar global (Suharto, 2017:5).

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan di suatu negara. Tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat saja, tetapi pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada tingkat kemiskinan dan pengangguran. Apabila perekonomian mampu melaksanakan pembagian kerja, maka proses pertumbuhan dapat dimulai. Produktivitas akan meningkat saat terjadi pembagian kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan (Mardikanto & Soebiato, 2017:11).

Menurut Niode (2019), sebagai landasan perekonomian bangsa dan kontribusi masyarakat terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan. Dalam perekonomian negara berkembang, UMKM memiliki peran yang signifikan dan strategis untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja secara global mencapai 50% dari 90% entitas bisnis. UMKM formal juga memberikan kontribusi sebesar 40% pada Produk Domestik Bruto (PDB) di negara berkembang (Bank Dunia dalam TNP2K, 2021).

Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Fenomena ini memberikan pengaruh pada berbagai aspek, meliputi domain kesehatan, pendidikan, tatanan sosial dan ekonomi. Akibatnya, diperlukan penerapan pendekatan perbaikan yang komprehensif dan beragam adaptasi sistematis baru, seperti

percepatan transformasi virtual. Menurut survei yang dilakukan oleh Twilio pada tahun 2020 yang melibatkan 2.569 peserta korporasi dari Australia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Singapura, Spanyol, Inggris dan Amerika terbukti bahwa percepatan transformasi virtual memang terjadi. Dibuktikan dengan 97% responden mengakui hal tersebut. Pada skala yang lebih luas, transformasi virtual ini memiliki dampak positif bagi perekonomian. Di Indonesia, integrasi teknologi baru berpotensi meningkatkan pertumbuhan sebanyak 0,55% pada Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua dekade setiap tahunnya hingga pada tahun 2040 (ADB dan Kemenkeu dalam Firdaus et al., 2021).

UMKM merupakan salah satu faktor yang juga membantu pertumbuhan produk domestik bruto akan tetapi produktivitas dari UMKM belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kualitas UMKM di setiap daerah masih belum optimal sehingga kontribusi yang diberikan terhadap pengembangan usaha rakyat, penyerapan tenaga kerja dan perekonomian daerah kurang terlihat. Padahal dengan banyaknya jumlah unit UMKM yang saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi akan semakin banyak perusahaan dan semakin besar juga output yang dihasilkan. Artinya, akan lebih banyak lapangan pekerjaan dan lebih sedikit pengangguran, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Seberapa cepat atau lambat proses pembangunan bergantung pada kualitas dari sumber daya manusia yang akan menjalankan pembangunan tersebut (Hanim & Noorman, 2018:40).

UMKM menjadi pasar yang sangat potensial di bidang industri jasa keuangan terutama bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan. Hal ini dikarenakan sekitar 60-70% pelaku UMKM masih belum memiliki akses dalam pembiayaan perbankan.

Diperlukan pemberian porsi yang lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil dan menengah. Perhatian pemerintah dan legislatif terhadap UMKM dibuktikan dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Diberlakukannya peraturan tentang UMKM akan menjadi payung hukum bagi pelaku UMKM agar dapat bergerak dengan leluasa (TNP2K, 2021).

UMKM memiliki kekuatan yang cukup besar bagi pertumbuhan perekonomian. Namun, pemerintah khawatir pertumbuhan yang terjadi bukan malah meningkat tetapi sebaliknya sehingga kebijakan pemerintah kembali kepada ekonomi konglomerasi yang dimana Indonesia mengejar pertumbuhan daripada pemerataan mengingat tekanan dari dunia internasional. Perubahan tersebut terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang awalnya diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kabupaten Sumenep sebagai salah satu daerah yang terletak di Jawa Timur dengan luas $2.093,46 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari 126 pulau. Dengan banyaknya pulau yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep, kemungkinan besar masyarakatnya memiliki pekerjaan. Sesuai dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep 897.722 penduduk usia kerja yang dimana 674.374 angkatan kerja dan 223.348 bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja 75-76 dari 100 merupakan angkatan kerja. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah yang selalu berupaya agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Kesejahteraan yang dimaksud tidak hanya tentang masalah ekonomi atau pendapatan, tetapi juga mencukupi kebutuhan sosial, fisik, mental maupun

spiritual karena meningkatnya kesejahteraan secara tidak langsung juga meningkatkan kualitas hidup semua pihak (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2023).

Sumber daya yang dimiliki Kabupaten Sumenep apabila tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelolanya. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menempuh pendidikan baik yang formal maupun informal. Diharapkan dengan meningkatkan kualitas diri, mereka bisa memperoleh penghasilan sesuai dengan kemampuannya. Ketersediaan sumber daya manusia yang melebihi jumlah lapangan pekerjaan membuat sebagian masyarakat lebih memilih menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dapat dilihat bahwa UMKM menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi (Hadinugroho et al., 2023).

Pemerintah harus terus mengembangkan UMKM karena pentingnya UMKM dalam sektor pembangunan ekonomi. Dengan memanfaatkan digitalisasi, Kabupaten Sumenep berpotensi memiliki ekonomi digitalisasi dan *e-commerce* sebagai mesin pengembangan utama dalam ekosistem ekonomi. Diperlukan proses perubahan yang efektif, dinamis dan berkelanjutan untuk mengembangkan UMKM melalui digitalisasi. Pemerintah Kabupaten Sumenep membangun Halal Hub untuk tempat pembinaan, ruang konsultasi UMKM, ruang sinergi antar dinas, ruang paguyuban UMKM dan Logistik Hub serta *packaging storage* untuk pengembangan langsung produk (Sekda Kabupaten Sumenep dalam (Admin, 2022)).

Dalam memanfaatkan teknologi dengan baik diperlukan peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia supaya bisa memperkuat intelektual setiap masyarakat. Meningkatnya kualitas pelaku UMKM akan mempengaruhi proses produksi dan produktivitas dalam membangun kekuatan ekonomi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dapat memudahkan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat (Rahmiyati et al., 2015).

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan membantu UMKM dalam menghadapi era digitalisasi adalah dengan dilakukannya pemberdayaan. Dilakukannya pemberdayaan dapat memberikan kekuatan kepada pelaku UMKM dalam mengerahkan dan memanfaatkan sumber daya alam, keterampilan, jaringan dan material untuk mengembangkan usahanya. Diperlukan pendampingan agar perkembangan UMKM terus meningkat. Pendampingan dapat dilakukan dengan menerapkan fungsi manajemen yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, penilaian dan pengembangan agar tujuan untuk mengembangkan UMKM dapat terwujud. Dibutuhkan keterlibatan secara langsung antara pelaku UMKM dengan penyedia jasa platform sosial dikarenakan pelaku UMKM merupakan aktor utama dalam proses pendampingan tentang peningkatan kapasitas digitalisasi (Fuadi et al., 2021).

Pemerintah Kabupaten Sumenep juga terus berupaya meningkatkan kualitas UMKM dengan mengadakan pemberdayaan UMKM. Tentunya pemberdayaan yang dilakukan harus dimulai dari sektor perdesaan, karena masih banyak masyarakat

pedesaan yang kurang mengetahui cara untuk mengembangkan usaha ataupun sumber daya alam yang dimiliki. Pemberdayaan tersebut dapat diberikan melalui pelatihan, sosialisasi, bantuan alat produksi, peningkatan sarana dan prasarana dan lain-lain yang bisa meningkatkan atau mengembangkan UMKM.

Pada saat ini, bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin mendaftarkan izin untuk usahanya dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal ini akan memudahkan pelaku UMKM untuk mendapatkan nomor induk berusaha dan mereka juga memperoleh fasilitasi kepemilikan hak kekayaan dalam negeri serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi dalam mengekspor produk yang mereka buat.

Setiap usaha yang dilakukan pasti mengalami beberapa permasalahan yang sering dihadapi sehingga pemberdayaan perlu dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang ada. Permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM adalah rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang teknologi produksi yang disebabkan oleh ketertarikan terhadap perubahan sangat minim dan kurangnya pengetahuan tentang cara pemasaran yang baik dikarenakan terbatasnya informasi mengenai pasar. Sumber daya yang dimiliki untuk dikembangkan sebagai usaha kurang dimanfaatkan, kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan laporan serta kurangnya modal yang dimiliki (Suyadi et al., 2018).

Pemberdayaan perlu dilakukan agar masyarakat maupun individu yang pemahamannya kurang mengenai pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan modal usaha dapat meningkat. Hakikatnya, dilakukannya pemberdayaan terhadap

masyarakat sebagai usaha untuk mengubah tingkah laku atau perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik agar kehidupan masyarakat secara bertahap dapat meningkat dan lebih berkualitas. Pemberdayaan kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopukmperindag).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa program yang telah dinas lakukan untuk membantu memberdayakan masyarakat dan mengembangkan UMKM yang dimiliki oleh masyarakat secara digitalisasi. Berikut tabel program yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Sumenep.

Tabel 1. 1 Data Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun Anggaran 2023

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Deskripsi Kegiatan
1	Strategi Pemasaran Di Era Digital Bagi Pelaku Usaha Roti Dan Kue (Studi Banding Kota Batu)	20	Melakukan studi banding lapangan kota batu membuat roti kue dengan isi selai buah, serta belajar bagaimana memasarkan produk tersebut secara digital dalam hal ini difokuskan melalui media sosial dan e commerce.
2	Sosialisasi Perizinan Dan Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha	50	Memaparkan pentingnya perizinan usaha bagi pelaku umkm, khususnya nib, pirt dan halal dengan harapan peserta nantinya akan memiliki perizinan usaha yang lengkap
3	Pendidikan Dan Pelatihan Akuntansi Dan Analisis Laporan Keuangan Bagi Koperasi	50	Memaparkan teori terkait bagaimana menyusun laporan keuangan koperasi serta bagaimana menganalisa kondisi keuangan koperasi
4	Pendidikan Dan Pelatihan Digital Marketing Bagi UMKM	50	Menjelaskan kepada peserta bagaimana strategi memasarkan produk secara digital (melalui media sosial)

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Deskripsi Kegiatan
5	Pendidikan Dan Pelatihan Laporan Keuangan Digital Bagi UMKM	50	Belajar menyusun laporan keuangan secara digital, dari sebelumnya disusun manual menjadi atau beralih menjadi digital
6	Total Manajemen Quality Bagi UMKM	30	Belajar bagaimana mengatur atau manajemen keseluruhan bidang baik manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen pemasaran, serta manajemen mutu produk. Sehingga peserta mampu mengatur kondisi usaha mereka
7	Kewirausahaan Berbasis Sumber Daya Lokal (Pelatihan Pangkas Rambut)	50	Peserta adalah pelaku usaha potong rambut yang masih pemula, calon wirausaha (orang yang sudah punya dasar terkait potong rambut namun belum membuka usaha. Sehingga harapannya peserta nantinya mampu meningkatkan keahliannya di bidang pangkas rambut dan mampu membuka usaha potong rambut.

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

Dari beberapa program yang telah dilaksanakan oleh dinas, yang berhubungan dengan digitalisasi adalah poin 1, 4 dan 5. Dengan program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Sumenep, mereka telah mendorong semua pelaku UMKM untuk memanfaatkan perkembangan dari teknologi dalam melakukan pemasaran secara digitalisasi.

Hal ini perlu dilakukan karena pada era saat ini perubahan yang terjadi membuat masyarakat tidak dapat menghindari adanya digitalisasi dan saat terjadinya Covid-19 yang membuat semua masyarakat harus beraktivitas di dalam rumah dan bagi pelaku usaha yang ingin bertahan harus bisa mengikuti atau beradaptasi terhadap perkembangan yang merubah sistem kerja dari tradisional menjadi modern.

Dalam pelaksanaan program digitalisasi masih banyak hal yang perlu diwaspadai terutama kesenjangan digitalisasi yang cukup terasa. Proses digitalisasi yang dilakukan tidak selalu mudah untuk dilaksanakan. Meskipun pemerintah telah turut membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya, tetapi terdapat kendala yang dihadapi pada saat di lapangan karena pada saat mengimplementasikan program yang diberikan tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi UMKM di Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan kualitas UMKM, yaitu masih banyaknya pelaku UMKM yang belum mengoptimalkan marketing digitalisasi meskipun telah diberi pelatihan oleh dinas, kurangnya konsistensi pelaku UMKM dalam mengikuti perkembangan yang terjadi saat ini, tidak ada kemauan untuk mendaftarkan usahanya dan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep berpikir bahwa bantuan yang diberikan oleh dinas adalah bantuan modal sehingga mereka tidak optimal dalam meningkatkan kualitas usahanya. Kebanyakan pelaku usaha masih mengelola usahanya secara tradisional (manual) dan hanya menggunakan media WhatshApp untuk mempromosikan usahanya, sehingga pemberdayaan perlu dilakukan terkait dengan bagaimana mengelola usaha secara digitalisasi tidak lagi secara manual.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang pemberdayaan UMKM melalui program digitalisasi di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep. Peneliti mengambil judul **“Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Digitalisasi (Studi Pada Dinas**

Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dari itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pemberdayaan UMKM Melalui Program Digitalisasi di Kabupaten Sumenep?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan Pemberdayaan UMKM Melalui Program Digitalisasi di Kabupaten Sumenep”.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa harapan dari dilakukannya penelitian ini, seperti dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak baik itu secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya di bidang Administrasi Publik dan sebagai acuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan pengalaman langsung mengenai pemberdayaan UMKM melalui program digitalisasi dan berkontribusi dalam membantu para pihak yang bekerja di bidangnya terkhusus bidang ilmu administrasi yang berhubungan dengan publik.

2) Bagi Instansi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberi masukan kepada pemerintah Kabupaten Sumenep terutama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam mengoptimalkan pengembangan pemberdayaan bagi UMKM melalui program digitalisasi.

3) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya manfaat dari pelaksanaan pemberdayaan UMKM agar usahanya tetap eksis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menunjukkan rincian atau rangkaian proposal sehingga tersusun secara sistematis, berikut gambaran susunan proposal penelitian:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, grand teori dan teori-teori pendukung di dalamnya serta terdapat definisi dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan keabsahan data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan visi misi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data-data yang diperoleh dari lapangan selama melakukan penelitian sesuai dengan fokus penelitian tentang Pemberdayaan UMKM Melalui Program Digitalisasi Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil dan pembahasan penelitian.